

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan masalah lingkungan saat ini telah menjadi prioritas global untuk menjaga kestabilan lingkungan di masa depan. Salah satu upaya nyata yang dilakukan yaitu melalui penerapan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berkaitan dengan isu lingkungan, SDGs menyertakan tujuan ke-12 yaitu “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab”, dimana pada target poin 5 disebutkan bahwa pada tahun 2030, setiap negara diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Tujuan ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengurangi timbulan sampah, terutama di wilayah perkotaan. Selaras dengan hal tersebut, tuntutan kepada pemerintah adalah untuk menyelaraskan kebutuhan lingkungan dengan kebijakan dan tindakan yang diambil. Perkembangan lingkungan menegaskan perlunya peran lembaga pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ini dalam kerangka demokrasi (Capah, dkk., 2023:151).

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merujuk pada sisa-sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang dapat berwujud padat atau semi padat, baik bahan organik maupun anorganik, yang bisa terurai atau tidak, dan dianggap telah kehilangan nilai fungsinya dan dibuang ke lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang semakin baik telah menjadi penyebab utama dari

masalah yang muncul terkait peningkatan volume sampah. Dewasa ini, volume sampah yang meningkat juga dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari masyarakat perkotaan. Kebiasaan membeli makanan siap saji dianggap lebih efisien oleh sebagian besar masyarakat perkotaan sehingga berdampak pada peningkatan sampah, seperti wadah makanan, peralatan makan, dan pembungkus sekali pakai (BPS, 2018).

Menurut data *World Population Review*, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 278,25 juta jiwa per Oktober 2023 lalu. Jumlah ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. India menempati posisi teratas dengan jumlah penduduk mencapai 1,43 miliar jiwa, kemudian Tiongkok di posisi kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 1,42 miliar jiwa, lalu Amerika Serikat menempati posisi ketiga dengan total penduduk 340,57 juta jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk sejalan pula dengan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan akibat padatnya aktivitas penduduk dan pola konsumsi masyarakat (Databoks, 2023). Berikut pada tabel disajikan jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2020-2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Timbulan Sampah di Indonesia

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (Juta Ton/Tahun)
2020	67,8
2021	68,5
2022	68,7
2023	69,9

Sumber: Databoks (2022); KLHK (2023)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 kemarin setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, untuk capaian pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah dengan sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia (Ton/Tahun)

Tahun	Penanganan Sampah	Pengurangan Sampah
2020	14.872.756,08	4.333.950,48
2021	9.486.561,99	3.181.217,41
2022	9.619.332,93	5.002.327,83
2023	9.782.308,12	3.258.383,14

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Data di atas merupakan capaian kinerja pengelolaan sampah nasional yang diambil dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dengan data 4 tahun terakhir yang diambil, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data di atas, pengelolaan sampah yang dilakukan melalui penanganan sampah dari tahun 2020 hingga 2023 kemarin mengalami penurunan yang fluktuatif, sedangkan untuk pengurangan sampah mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif pula.

Sebagian besar wilayah dengan timbulan sampah terbanyak diketahui berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2022 lalu, Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan timbulan sampah terbanyak, yaitu sejumlah 4,9 juta ton (Databoks, 2022). Berikut disajikan jumlah timbulan sampah pada setiap kota di Jawa Barat pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

Tabel 1. 3 Jumlah Timbulan Sampah Kota pada Provinsi Jawa Barat

No.	Kota	Tahun (Ton/Hari)		
		2021	2022	2023
1.	Bandung	1.529,04	1.594,18	1.766
2.	Bekasi	2.500,77	1.830,63	1.700
3.	Depok	1.314,14	1.377,77	1.200
4.	Bogor	673,76	779,81	744,46
5.	Cirebon	229,75	282,291	212,84
6.	Tasikmalaya	219,11	281,87	200,76
7.	Cimahi	274,77	275,46	149,90
8.	Sukabumi	180,26	180,35	180,41
9.	Banjar	60,29	85,67	50

Sumber: *Open Data Jawa Barat 2021-2023*

Berdasarkan data di atas, Kota Bandung menempati posisi pertama dengan jumlah timbulan sampah terbanyak dimana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Terdapat penelitian terdahulu yang menjadikan Kota Bandung sebagai lokus dalam fenomena persampahan yang dilakukan oleh Pekasih, dkk (2022) dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Program KANG PISMAN (Kurangi, Pisahkan, Dan Manfaatkan) Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah di Kota Bandung” menyatakan bahwa pelaksanaan kolaborasi sudah cukup baik, tetapi masih terhambat dalam pengalokasian dana serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kota Bekasi menempati posisi kedua dengan timbulan sampah terbanyak. Dari tahun 2021 hingga 2023 kemarin jumlah timbulan sampah terus mengalami penurunan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra, M (2023) dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat” menyatakan bahwa kolaborasi sudah berjalan,

tetapi belum optimal karena masih kurangnya koordinasi antar pihak, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Pada posisi ketiga terdapat Kota Depok, dimana jumlah timbulan sampahnya mengalami angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayuningtyas, C., dkk (2023) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dan Produsen dalam Pengelolaan Sampah di Kota Depok, Jawa Barat” menyatakan bahwa partisipasi antara masyarakat dan produsen dalam pengelolaan sampah sudah berjalan dengan cukup baik. Pemkot Depok juga melakukan kerja sama dengan berbagai produsen, pabrik daur ulang, pihak swasta, serta lembaga seperti World Wild Life Indonesia dalam berbagai program pengelolaan sampah.

Pada posisi keempat terdapat Kota Bogor, dengan jumlah timbulan sampah yang mengalami angka fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky, S., dkk (2024) dengan judul “Model *Collaborative Governance* Dpengelolaan Persampahan di Kota Bogor” menyatakan bahwa *collaborative governance* sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi belum optimal dalam hal pembagian kerja antar aktor dan rekomendasi yang diberikan yaitu model tata kelola kolaboratif yang dimulai dari rumah tangga, kecamatan, dan perkotaan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa sudah terdapat penelitian yang mengkaji terkait topik kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Bandung, Bekasi, Depok, dan Bogor. Diketahui belum adanya penelitian yang mengkaji topik kolaborasi dalam fenomena persampahan di Kota Cirebon yang menduduki posisi kelima dengan timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi landasan bagi peneliti melakukan

penelitian lebih lanjut dengan topik kolaborasi khususnya dalam fenomena pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

Kota Cirebon mendapati pertumbuhan penduduk yang cukup pesat setiap tahunnya. Menurut statistik dari BPS, terdapat informasi mengenai jumlah populasi di Kota Cirebon pada awal tahun 2018 hanya 301.720 jiwa, tetapi meningkat pada tahun 2023 menjadi 348.912 jiwa. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi di Kota Cirebon juga makin tinggi. Dari data BPS Kota Cirebon diketahui ekonomi Kota Cirebon tahun 2022 menjumpai pertumbuhan sebesar 5,10% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan munculnya pusat-pusat perdagangan dan jasa sehingga jumlah volume sampah per hari meningkat.

Permasalahan sampah yang dihasilkan dari aktivitas warga Kota Cirebon sangat membebani lingkungan karena beberapa faktor, antara lain sarana dan prasarana, jumlah petugas lapangan, dan alokasi anggaran untuk masalah sampah, sehingga proses pengelolaan sampah saat ini masih belum maksimal. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah juga menjadi permasalahan yang signifikan (LKIP DLH Kota Cirebon, 2022). Dengan kondisi ini, tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat karena volume sampah yang terus bertambah di Kota Cirebon.

Tabel 1. 4 Jumlah Produksi Sampah di Kota Cirebon pada Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Produksi Sampah	Satuan
2019	245	Ton (m ³) per hari
2020	192	Ton (m ³) per hari
2021	229,75	Ton (m ³) per hari

Tahun	Jumlah Produksi Sampah	Satuan
2022	282,291	Ton (m ³) per hari
2023	212,84	Ton (m ³) per hari

Sumber: Open Data Jawa Barat 2019-2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa volume sampah di Kota Cirebon fluktuatif. Jumlah tersebut juga belum termasuk volume sampah yang dibuang oleh warga masyarakat di tempat-tempat yang dilarang yaitu di sungai, pantai, pinggir jalan, lahan kosong, got/selokan, dan sebagainya. Pada tahun 2022 terlihat jumlah produksi sampah paling banyak, yaitu dari 282,291 m³ sampah yang dihasilkan di Kota Cirebon per hari tersebut, volume sampah yang dapat diangkut dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) hanya sekitar 250 m³ per hari. Dengan demikian, dalam setiap hari terdapat 32,291 m³ sampah yang tidak terangkut dari TPS ke TPA sehingga sampah tersebut menumpuk di TPS. Volume sampah sebanyak 250 m³ tersebut diangkut dari TPS ke TPA sebanyak 80 rit atau 80 kali perjalanan pulang pergi dari TPS ke TPA (Tribun Jabar, 2023).

Pengelolaan sampah di Kota Cirebon perlu mendapat perhatian yang serius karena volume sampah pada tahun 2023 kemarin meskipun sudah mengalami penurunan, tetapi hal tersebut belum mampu mencapai target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Pemerintah Kota Cirebon c.q. DLH Kota Cirebon telah berusaha menarik minat investor untuk berkolaborasi dalam pengolahan sampah di TPA Argasunya menjadi kompos, bahan bakar, dan lain-lain yang memiliki nilai tambah secara ekonomis. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada perusahaan atau investor yang tertarik untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon c.q. DLH dalam pengolahan sampah di TPA tersebut.



Gambar 1. 1 Kegiatan Masyarakat pada TPA Argasunya

Sumber: Cirebonkota.go.id, 2023

Ratusan masyarakat bekerja sebagai pemulung pada TPA Argasunya untuk mencari nafkah. Kehadiran mereka berkontribusi pada pengurangan volume sampah harian hingga satu ton. TPA ini juga memiliki sumber mata air bersih yang secara teratur disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk masjid maupun komunitas yang lebih luas. UPT TPA turut memberdayakan masyarakat sekitar dengan mempekerjakan tenaga kerja terampil seperti supir truk dan operator alat berat. UPT TPA berusaha semaksimal mungkin agar hal-hal teknis agar pengelolaan sampah di Kota Cirebon dapat berjalan lancar.

Menurut Syafrudin (2001), hasil pengelolaan sampah suatu kota sangat mencerminkan bentuk atau citra kota tersebut, semakin bersih kotanya, maka semakin baik pula sistem kinerja pengelolaan sampahnya, begitupun sebaliknya. Hasil dari kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai yang signifikan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pencegahan pencemaran lingkungan. Selain itu juga meningkatkan nilai sosial budaya masyarakat.

Penegakan tindakan terhadap masalah sampah menjadi krusial karena kelalaian dalam manajemennya dapat berdampak serius pada ekosistem, seperti banjir dan kerusakan lingkungan. Selain itu, sebuah sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi diperlukan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh penumpukan sampah karena pembuangan yang tidak tepat dapat menyebarkan penyakit. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tanggung jawab pengelolaan sampah merupakan kerja sama antara pemerintah dan pemerintah daerah, yang dapat dijalankan melalui kolaborasi dengan badan usaha serta melibatkan organisasi dan masyarakat dalam pengelolaannya.

Pada pengelolaan sampah yang baik tentu akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kota berkolaborasi untuk menetapkan berbagai program bersama dengan *stakeholder* lainnya. Kolaborasi dilakukan oleh Pemerintah Kota karena berbagai keterbatasan sumber-sumber daya yang dimiliki, terutama keterbatasan anggaran untuk membiayai program-program pembangunan

dan pengadaan sarana prasarana. Kolaborasi menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mencapai tujuan SDGs. Hal ini juga dalam rangka mencapai tujuan SDGs ke-12 yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan berbagai pihak termasuk pihak swasta atau perusahaan serta masyarakat. Penjelasan ini sejalan dengan tujuan SDGs ke-17 yaitu "Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan", dimana salah satu target dari tujuan ini pada point 17 yaitu mendorong dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.

Thomson dan Perry (dalam Fairuza, 2017:4) mendefinisikan kolaborasi yaitu proses dimana aktor terlibat dalam pembicaraan formal dan informal untuk bersama-sama menciptakan struktur dan norma yang mengatur hubungan dan cara mereka berperilaku, serta memutuskan hal-hal yang menyatukan mereka dan merupakan hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nawawi (dalam Dorisman, dkk., 2021:72) mendeskripsikan bahwa kolaborasi adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dengan cara membagi tugas atau pekerjaan, bukan sebagai pembagian kerja, melainkan sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terfokus untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kolaborasi merupakan pilihan terbaik untuk memperoleh tujuan publik yang telah ditentukan.

Sebagai upaya turut serta untuk mewujudkan tujuan SDGs ke-12, Pemerintah Kota Cirebon melakukan kolaborasi dengan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sampah, dimana hal ini didasarkan pada strategi mencari alternatif pembiayaan nonpemerintah melalui kerja sama atau kolaborasi dengan badan

usaha/swasta sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah yaitu Sekretaris Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), kolaborasi ini dilakukan karena masalah sampah merupakan salah satu dari lima masalah krusial yang dihadapi di Kota Cirebon. Keempat masalah krusial lainnya yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pedagang Kaki Lima (PKL), lalu lintas, dan perparkiran.

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah tersebut dilakukan karena Pemerintah Kota Cirebon memiliki keterbatasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pengelolaan sampah tersebut secara optimal. Diketahui APBD Kota Cirebon pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 1.432.691.743.612,- dimana untuk pembiayaan pengelolaan sampah dialokasikan sebesar Rp 14.354.328.221,- atau hanya sekitar 1% dari total Pendapatan Daerah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon mengidentifikasi tiga isu prioritas lingkungan hidup dengan nilai prioritas tertinggi, yaitu pada prioritas pertama terdapat hal pengelolaan sampah, prioritas kedua yaitu pemenuhan RTH, dan prioritas ketiga pengendalian banjir atau genangan. Temuan ini didasarkan pada perumusan isu prioritas terhadap masing-masing bobot dan kriteria (LKIP DLH Kota Cirebon, 2023).

Tugas utama dari DLH Kota Cirebon adalah mendukung wali kota dalam menangani urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Kota Cirebon dalam hal perlindungan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sampah. Pada DLH Kota Cirebon, pengelolaan sampah secara khusus ditangani oleh:

1. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Pengurangan Sampah.
 - b. Sub Koordinator Penanganan Sampah.
 - c. Sub Koordinator Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri atas:
 - a. UPT Pengelolaan Sampah.
 - b. UPT Tempat Pemrosesan Akhir.

Pengelolaan sampah oleh DLH Kota Cirebon didasarkan pada kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini adalah turunan dari kebijakan nasional berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Peraturan Wali Kota ini adalah turunan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018.
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 dijelaskan bahwa sampah adalah residu dari aktivitas manusia sehari-hari atau alam yang berwujud padat. Sampah ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Sampah rumah tangga, yaitu limbah yang dihasilkan dari aktivitas rutin di dalam rumah tangga yang tidak termasuk dalam kategori limbah khusus atau limbah berbahaya.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari area-area khusus seperti komersial, industri, dan fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik, yaitu limbah yang memerlukan penanganan khusus karena komposisi, volume, atau sifatnya yang spesifik. Sampah spesifik terdiri atas :
 - a. Limbah mengandung zat beracun dan berbahaya.
 - b. Limbah beracun dan berbahaya.
 - c. Sisa limbah setelah terjadi bencana.
 - d. Puing dari bangunan yang telah dirobohkan.
 - e. Limbah yang belum dapat dikelola dengan teknologi yang ada.
 - f. Limbah yang tidak mengikuti siklus tertentu.

Beragam jenis sampah tersebut perlu dilakukan pengelolaan sampah dengan baik. Pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah meliputi dua jenis kegiatan yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

DLH Kota Cirebon melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah dengan *stakeholders* lainnya yang berupa perusahaan dan pelaku usaha yang melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL di Kota Cirebon didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon.
2. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon.

Berdasarkan Perda TJSL, kolaborasi dalam Program TJSL bidang pengelolaan sampah di Kota Cirebon dilakukan secara berkelanjutan yaitu:

1. Kolaborasi dalam Program TJSL bidang pengelolaan sampah di Kota Cirebon dilakukan berdasarkan salah satu asas Program TJSL yang ditetapkan dalam Perda TJSL yaitu asas kelestarian yang berkelanjutan. Di dalam Perda TJSL dijelaskan bahwa asas kelestarian yang berkelanjutan menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap masa depan generasi berikutnya serta rekan-rekan mereka dalam satu periode, dengan melakukan tindakan untuk melestarikan keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
2. Kolaborasi dalam Program TJSL bidang pengelolaan sampah di Kota Cirebon diharapkan adanya keberlanjutan dalam pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang berasal dari bantuan perusahaan dan *stakeholders* lainnya dalam Program TJSL tersebut. Dengan demikian, bantuan sarana

prasarana pengelolaan sampah tersebut dapat dimanfaatkan selama mungkin melalui pemeliharaan sarana prasarana yang optimal.

3. Bantuan berupa sarana prasarana pengelolaan sampah dari Program TJSL diharapkan berkelanjutan yaitu setiap tahun ada perusahaan dan *stakeholders* lainnya yang memberikan bantuan sarana prasarana tersebut. Dengan demikian, masalah keterbatasan anggaran dalam APBD Kota Cirebon untuk pengadaan sarana prasarana tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi dalam Program TJSL, sehingga pengelolaan sampah di Kota Cirebon dapat dilakukan secara lebih optimal untuk mengatasi masalah sampah di Kota Cirebon.

Selanjutnya, bentuk kolaborasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk perwujudan tujuan SDGs ke-12 yaitu melalui bank sampah (Capah., dkk, 2023:158). Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan di Kota Cirebon juga melakukan kolaborasi dalam bank sampah pada program TJSL-nya. Bank sampah merupakan salah satu strategi pengolahan limbah anorganik dengan konsep *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R). Bank Sampah merupakan suatu model pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon yaitu dalam hal pengangkutan sampah yaitu pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (RPPK).

Dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon c.q. DLH Kota Cirebon selama tahun 2016-2023 telah melakukan kolaborasi dengan *stakeholders* lainnya dalam kegiatan-kegiatan yaitu:

Tabel 1. 5 Kegiatan-kegiatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon Tahun 2016-2023

No.	<i>Stakeholders</i>	Tahun dan Kegiatan
1.	Perseroan Terbatas (PT). Cinta Damai Putra Bahagia Cirebon	2018: Bantuan 1 unit mobil pengangkut sampah
2.	PT. KAI Daop 3 Cirebon	2019: Bantuan 1 unit mobil pengangkut sampah
3.	Wa Haha Hotel dan Entertainment Cirebon	2019: Bantuan 1 unit gerobak sampah
4.	PT. Pegadaian Cabang Cirebon	2019: Meluncurkan Program “The Gade Clear & Gold” pada 18 Bank Sampah di Kota Cirebon, di mana sampah di Bank Sampah itu dapat ditukar dengan emas serta memberikan bantuan sarana sepeda pengangkut sampah untuk bank sampah
5.	PT. Pelindo II Cirebon	2020: Bantuan 4 unit motor roda tiga pengangkut sampah
6.	Complete Seluler dan Rumah Zakat	Pembangunan bank sampah di sejumlah tempat : <ul style="list-style-type: none"> • 2014 : RW 09 Kampung Kesunean Selatan, Kelurahan Kasepuhan • 2020 : RW 10 Kanoman Utara, Kelurahan Pekalipan • 2020 : RW 06 Simaja Utara, Kelurahan Drajat • 2021 : RW 06 Desa Kramat, Kelurahan Kesenden • 2021 : RW 04 Kesenden, Kelurahan Kesenden • 2021 : RW 04 Kebon Benteng Tengah, Kelurahan Kesenden • 2022 : RW 06 Tanda Barat, Kelurahan Kebonbaru
7.	Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon	2022: Bantuan 47 unit gerobak sampah dan 4 unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah

No.	Stakeholders	Tahun dan Kegiatan
8.	PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> • 2021 : Membuka dan meresmikan program TJSJ berupa bank sampah di RW 07 Kayuwalang • 2022: Memberikan sejumlah fasilitas bank sampah (tong sampah, komposter, mesin pencacah daun, gerobak, dan timbangan) untuk masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas di RW 07 Kayuwalang
9.	Sejumlah 43 pelaku usaha (hotel, sekolah, yayasan, mall, rumah sakit, dan lain-lain)	2019-2023: Sebanyak 43 pelaku usaha melakukan MoU dengan DLH dalam pengangkutan sampah

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber, 2023

Berdasarkan hasil observasi, diduga bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon selama ini belum efektif sebagaimana terlihat dari beberapa fenomena yaitu:

1. Berdasarkan tabel 1.5, diketahui belum banyak perusahaan atau pelaku usaha di Kota Cirebon yang melakukan Program TJSJ dalam bidang pengelolaan sampah.
2. Belum optimalnya kolaborasi dalam pelayanan pengangkutan sampah. Baru puluhan perusahaan yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon c.q. Dinas Lingkungan Hidup dalam pengangkutan sampah ke TPA. Sebagian besar perusahaan masih membuang sampah secara langsung ke TPS milik Pemerintah Kota Cirebon yang tersebar di beberapa lokasi.
3. Belum optimalnya kolaborasi berupa pendirian bank sampah di tingkat RW karena dari 249 RW di Kota Cirebon hanya 27 unit bank sampah yang tersedia.

Berdasarkan beberapa fenomena yang sudah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan masalah dalam Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori administrasi publik, terutama dalam konteks teori kolaborasi.

2. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur dalam ranah ilmu administrasi publik, khususnya dalam topik kolaborasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Cirebon khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian tentang kolaborasi.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *state of the art* merupakan berbagai penelitian yang telah diteliti oleh beberapa orang sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi usaha peneliti untuk mencari perbedaan dan selanjutnya agar peneliti mendapatkan inspirasi atau pembaharuan untuk penelitian selanjutnya, serta membantu untuk membuktikan orisinalitas terhadap penelitiannya. Berikut disajikan sepuluh tabel penelitian terdahulu dengan topik kolaborasi.

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	<p>“Kolaborasi Multi-<i>Stakeholders</i> Pada Praktik <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Penanganan Sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon”.</p> <p>Yorri Harlyandra & Kafa Abdallah (2021).</p>	<p>Mengetahui kolaborasi multi-stakeholder dalam upaya penanganan sampah guna mencapai apa yang telah menjadi tujuan dari adanya praktik CSR.</p>	<p>Kolaborasi multi-stakeholder sudah berjalan cukup efektif. Masing-masing <i>stakeholder</i> yaitu pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki peranan yang berbeda (<i>inisiator, enabler, mentor, dan controller; regulator, dan implementor</i>).</p>
2.	<p>“<i>Collaborative Governance</i> Dalam Program KANG PISMAN (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Bandung”.</p> <p>Cipta Pekasih., dkk (2022).</p>	<p>Mengkaji bagaimana <i>Collaborative Governance</i> yang terjalin dalam proses tata kelola sampah di Kota Bandung khususnya dalam program Kang Pisman.</p>	<p>Hasil yang didapat proses kolaborasi yang dilakukan beberapa pihak sudah berjalan cukup baik, tetapi masih harus adanya evaluasi serta peningkatan program agar berjalan lebih efektif dan maksimal karena permasalahan sampah di Kota Bandung cukup kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius. Terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan dana serta kurangnya pemberian pemahaman kepada masyarakat</p>
3.	<p>“<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penyelesaian Masalah Sampah Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat”.</p> <p>M. Rezky Putra (2023).</p>	<p>Menganalisis <i>collaborative governance</i> dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Bekasi, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat beserta upaya-</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam prosesnya masih ditemui hambatan yaitu kurangnya anggaran dan sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah lebih mengoptimalkan keterlibatan</p>

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
		upaya yang dilakukan.	pihak ketiga dalam pengelolaan persampahan agar berjalan dengan efektif.
4.	"Model <i>Collaborative Governance</i> Pengelolaan Persampahan Di Kota Bogor". Sri Afnitawati, dkk (2024).	Menganalisis model <i>Collaborative Governance</i> yang ideal diterapkan dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Bogor.	<i>Collaborative Governance</i> sudah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Rekomendasi penerapan model tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah terpadu yang ideal dibagi menjadi tiga tahapan pengelolaan: 1) Pengelolaan kolaboratif skala rumah tangga (sumber), 2) Pengelolaan sampah kolaboratif skala kawasan (kecamatan), 3) Pengelolaan sampah kolaboratif skala perkotaan.
5.	"Keterlibatan Pentahelix Dalam Pengelolaan Bank Sampah". M. Daffa Rizqi & Santoso R (2023).	Mendeskripsikan kolaborasi stakeholder dan keterlibatannya dalam program CSR dalam pengelolaan bank sampah.	Pada implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program CSR "Bank Sampah" terdapat keterlibatan dari berbagai aktor, yaitu sektor pemerintahan, bisnis, masyarakat, dan akademisi. Terdapat perbedaan peranan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing stakeholders untuk menunjang kesuksesan program. Kolaborasi yang dijalankan sudah berjalan cukup baik karena terjadi peningkatan kualitas dalam seluruh tahapan proses kolaborasi yang mampu meningkatkan keberlanjutan program.
6.	"Keterlibatan Aktor dalam Kerjasama Pengelolaan <i>Corporate Social Responsibility</i> Badan Usaha	Menganalisis keterlibatan aktor melalui pendekatan triple helix dalam kerjasama pengelolaan CSR	Kolaborasi triple helix yang berlangsung pada pengelolaan CSR BUMD Prov. Jabar terdapat aktor yang memiliki peranan berbeda untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjalankan program CSR

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
	Milik Daerah Provinsi Jawa Barat". Fauzi Akbar, dkk (2021).	yang diharapkan mampu menunjang anggaran pembangunan daerah.	kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam mengelola program pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah. Beberapa aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Prov. Jabar melalui Tim Fasilitasi CSR (pemerintah), Pelaku BUMD yaitu PT. Migas Hulu Jawa Barat (pengusaha), dan peran akademisi yang sekaligus menjadi kelompok penerima program CSR.
7.	<i>"Examining Collaboration Among Nonprofit Organizations for Social Responsibility Programs"</i> . Zeimers et.al. (2019).	Mengkaji bentuk kolaborasi tertentu dalam lanskap nirlaba untuk program CSR.	Nonprofit Organizations menerapkan program CSR sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat, sedangkan kolaborasi menjadi sarana berharga untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Legitimasi organisasi, dan kebutuhan pertukaran sumber daya untuk program CSR mendorong pelaksanaan kolaborasi.
8.	<i>"The Role of Collaboration in Achieving Corporate Social Responsibility Objective Programs"</i> . John P & Loren F (2019).	Mengetahui peran kolaborasi dalam mencapai program objektif dari CSR.	Perusahaan melakukan inisiatif CSR untuk penghematan biaya dan pemberdayaan karyawan agar meningkatkan efisiensi. Kolaborasi terfokus pada satu LSM dengan keahlian dalam konservasi energi yang akan menjadi struktur efisien serta pentingnya pengukuran kinerja terhadap target.
9.	<i>"Collaborative Governance In Waste Management (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo"</i>	Mengetahui proses kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berlangsung di kawasan TPST Tambakrejo	Pelaksanaan kerjasama yang berada di TPST Tambakrejo telah berlangsung cukup baik dimana dapat dilihat dari kriteria berdasarkan Ansell & Gash, tetapi masih terdapat hambatan yaitu dalam hal membangun kepercayaan dan kurangnya pemahaman

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
	<i>Area, Sidoarjo Regency)</i> ". Adelia Dwinta & Arimurti Kriswibowo (2021).		masyarakat terkait pengelolaan sampah.
10.	<i>"Against Food Waste: CSR for the Social and Environmental Impact through a Network-Based Organizational Model"</i> . Sara Moggi, et.al (2019).	Mengeksplorasi peran efektif CSR dalam mengurangi limbah makanan, memerangi kemiskinan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.	CSR dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang memungkinkan petani dan organisasi pasar mereka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas terhadap komunitas lokal, meningkatkan proses, dan mengurangi limbah pangan, serta berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan inklusi sosial.

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber, 2023

Berdasarkan tabel 1.6 di atas, peneliti mengklasifikasikan beberapa penelitian terdahulu dengan sebagai berikut:

A. Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah

Penelitian terdahulu terkait topik kolaborasi khususnya dalam fokus pengelolaan sampah di berbagai daerah dapat dilihat dengan judul berikut:

- *Collaborative Governance* Dalam Program KANG PISMAN (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Bandung
- *Collaborative Governance* Dalam Penyelesaian Masalah Sampah Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
- Model *Collaborative Governance* Pengelolaan Persampahan Di Kota Bogor

- *Collaborative Governance In Waste Management (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo Area, Sidoarjo Regency)*

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian dengan empat judul di atas pada pelaksanaan kolaborasi dalam mengatasi permasalahan sampah sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat faktor penghambat yang mayoritas sama di setiap daerah, yaitu keterbatasan anggaran dan rendahnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah. Adapun kontribusi penelitian terdahulu tersebut terhadap penelitian ini adalah menambah pengetahuan terkait bagaimana pelaksanaan kolaborasi dalam permasalahan sampah di suatu daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, menganalisis kolaborasi *stakeholders* pada bidang pengelolaan sampah, kemudian perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan, dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan teori kolaborasi Ansell & Gash (2007), sedangkan penelitian ini menggunakan gabungan tiga teori kolaborasi dari Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), serta Emerson & Nabatchi (2015).

B. Kolaborasi dengan melibatkan *Corporate Social Responsibility*

Penelitian terdahulu terkait topik kolaborasi pengelolaan sampah yang turut melibatkan peran CSR di berbagai daerah dapat dilihat dengan judul berikut:

- Kolaborasi Multi-*Stakeholders* Pada Praktik *Corporate Social Responsibility* dalam Penanganan Sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon
- Keterlibatan Pentahelix Dalam Pengelolaan Bank Sampah

- Keterlibatan Aktor dalam Kerjasama Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat
- *Examining Collaboration Among Nonprofit Organizations for Social Responsibility Programs*
- *The Role of Collaboration in Achieving Corporate Social Responsibility Objective Programs*
- *Against Food Waste: CSR for the Social and Environmental Impact through a Network-Based Organizational Model*

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian dengan enam judul di atas bahwa CSR menjadi wadah untuk menangani masalah sosial yang kompleks, pada pelaksanaan kolaborasi pun sudah berjalan dengan cukup baik, ditunjukkan dengan masing-masing *stakeholders* memiliki peran dan kewenangan yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat menyukseskan program yang berlangsung. Adapun kontribusi penelitian terdahulu tersebut terhadap penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh CSR untuk membantu pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan di masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, menganalisis kolaborasi *stakeholders* yang turut melibatkan CSR, kemudian perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) yaitu

suatu proses di mana sumber daya dan tenaga kerja yang berasal dari sektor publik diatur dan diselaraskan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai bidang ilmu, administrasi publik bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik dengan cara meningkatkan atau menyempurnakan terutama dalam hal organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Secara khusus, aktivitas administrasi publik berfokus pada manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:5), administrasi publik dijelaskan sebagai gabungan yang kompleks dan tidak terstruktur antara teori dan praktek. Administrasi publik bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga memperbaiki praktik manajerial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma Administrasi Publik Klasik (*Classic/Old Public Administration*)

a. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Wilson merupakan pelopor dari paradigma ini dengan ide pemikiran “menarik garis demarkasi atau batas antara politik dan administrasi”. Hal ini menjadi ciri dari paradigma ini, yaitu adanya pernyataan yang tegas untuk berpisah dari induk semangnya, yaitu ilmu politik. Birokrasi pemerintah berfungsi sebagai “lokus” administrasi negara, dan dengan demikian merupakan satu-satunya titik penekanan dalam paradigma 1.

b. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Perkembangan “prinsip-prinsip administrasi” telah mendapat banyak manfaat dari administrasi publik. Luther Gulick dan Lyndall Urwick menyatakan bahwa prinsip-prinsip sangat penting bagi administrasi sebagai sebuah ilmu. Singkatan dari prinsip administrasi yang terkenal adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*). Pada paradigma 2 ini yang penting bukanlah lokasi, melainkan fokus.

c. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Selama era ini, ilmu politik menjadi subjek yang sangat dominan dalam bidang administrasi publik, sehingga administrasi publik menghadapi krisis identitas. Munculnya paradigma baru menganggap administrasi publik sebagai cabang dari ilmu politik dengan birokrasi pemerintah sebagai fokus kontrolnya sehingga fokus menjadi kurang jelas karena banyaknya kekurangan dalam prinsip-prinsip administrasi publik.

d. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Masa ini adalah upaya dari beberapa para ahli administrasi publik mencari alternatif, yakni untuk mengembangkan administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Ilmu administrasi lebih menekankan pada fokus daripada lokus, dan administrasi serta prinsip-prinsip panduannya selalu dapat diterapkan di mana pun mereka berada. Administrasi negara sedang mencari paradigma baru yang dapat mengatasi fokus dan lokusnya karena masalah paradigma 4 yang sedang berlangsung tidak dapat menyelesaikan masalah “lokus”.

e. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Saat ini, teori organisasi-sebuah cabang yang berbeda dari administrasi publik-telah muncul dari administrasi negara. Meskipun “ilmu administrasi negara murni” belum diidentifikasi sebagai fokus administrasi negara, setidaknya teori organisasi telah berkembang dan dimasukkan ke dalam kemajuan terbaru dalam metodologi terapan ilmu manajemen.

Paradigma Administrasi Publik Kontemporer (*Contemporary Public Administration*)

a. *New Public Administration* (NPA)

Paradigma ini lahir sebagai konsekuensi dari dinamika tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, yaitu tugas administrasi negara bukan saja untuk kepentingan negara, tetapi terutama untuk kepentingan masyarakat (publik). Menurut perspektif Keban (2014:4), NPA ini termasuk ke dalam paradigma *administration for public*, bukan lagi *administration of public* seperti dalam OPA. Pada paradigma *administration for public* ini masyarakat memainkan peranan yang penting sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan.

b. *New Public Management* (NPM)

NPM berasal dari gagasan umum manajemen publik. Ciri utama NPM adalah pergeseran dari kerangka kerja birokrasi yang didasarkan pada peraturan yang seragam ke sistem manajemen publik yang lebih mudah beradaptasi dan berfokus pada kepentingan publik (Mahmudi, 2005:43). NPM tidak lagi menganut

paradigma *administration of public* seperti dalam OPA. Jika dikaitkan dengan paradigma yang dikemukakan oleh Keban (2014:4), NPM ini sesuai dengan paradigma *administration for public*, yang bertujuan untuk membuat pemerintah lebih responsif, lebih berperan dalam mencapai tujuan penyediaan layanan publik, dan lebih berpengetahuan dalam melakukannya.

c. *New Public Service (NPS)*

Prinsip dalam NPS adalah "*Serving, not steering*" (melayani, bukan mengarahkan). Menurut Denhardt & Denhardt (2003:18), teori NPS melihat birokrasi sebagai instrumen rakyat, dan harus tunduk pada suara rakyat, asalkan suara tersebut masuk akal dan sah menurut norma dan konstitusi. Konsep NPS menjanjikan transformasi yang sesungguhnya dari kondisi birokrasi pemerintahan saat ini, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik yang demokratis.

d. *Governance (1990-sekarang)*

Pergeseran paradigma dari "*government*" menjadi "*governance*" telah terjadi dalam administrasi negara dan pemerintahan. Akibatnya, pemerintah tidak lagi memonopoli penyelenggaraan negara, tetapi harus berbagi peran dengan sektor swasta dan masyarakat sipil agar paradigma ini dapat berkembang dengan cara yang mendorong praktik pengelolaan pemerintahan yang efektif. Pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat merupakan tiga elemen utama dalam tata kelola pemerintahan. Ide dasar dari paradigma ini, menurut Cheema (dalam Keban, 2014), adalah untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah untuk memajukan pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma Administrasi Publik Kontemporer, khususnya dalam paradigma Governance. Hal ini karena pada paradigma Governance, pemerintah bukan satu-satunya aktor dalam pembangunan dan pelayanan publik, melainkan terdapat aktor lain yaitu swasta dan masyarakat sipil sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kolaborasi antara swasta dengan pemerintah, termasuk juga pada kolaborasi pengelolaan sampah, dimana aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Kota dan stakeholders lainnya. Jika dikaitkan dengan pendapat Keban (2014), kolaborasi ini merupakan implementasi dari *administration by public*. Hal ini karena *stakeholders* yaitu beberapa perusahaan turut terlibat dalam pembangunan dan pelayanan publik, tidak lagi seperti dalam *administration of public* yang aktornya hanya pemerintah.

Proses administrasi publik berfungsi sebagai kegiatan manajemen itu sendiri, dan manajemen publik merupakan bagian dari administrasi publik. Penting untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas yang sudah ada sambil meningkatkan birokrasi di era modern, termasuk organisasi dan sumber daya keuangan dan manusia yang tersedia, manajemen publik merupakan komponen kunci dari administrasi publik. Gagasan manajemen publik mengacu pada upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan layanan terbaik. Begitu pula dengan permasalahan sampah di Kota Cirebon yang merupakan urusan publik yang harus dikelola melalui manajemen publik dengan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kota dengan perusahaan dan *stakeholders* lainnya.

1.5.4 Manajemen Publik

Ghofur (dalam Dwiyanto, 2020:3) mendefinisikan manajemen publik sebagai manajemen pemerintahan, yang secara tidak langsung juga bertujuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelayanan masyarakat. Menurut Ott, Hyde & Shafritz, (dalam Dwiyanto, 2020:4), manajemen publik adalah bagian dari administrasi publik yang memusatkan perhatiannya pada penelitian tentang rancangan program dan pembaharuan struktur organisasi, pengalokasian sumber daya melalui sistem anggaran, pengelolaan keuangan, manajemen SDM, serta evaluasi program dan audit. Di dalam bidang administrasi publik, manajemen publik berfokus pada bidang-bidang manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, desain program, reorganisasi organisasi, dan distribusi sumber daya sistem penganggaran.

Menurut Overman (dalam Keban, 2014:92-93), manajemen publik adalah disiplin ilmu yang menggabungkan aspek-aspek umum dari sebuah organisasi dengan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, sejalan dengan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Ini berarti manajemen publik merupakan usaha untuk mengelola sumber daya yang tersedia sesuai dengan kerangka yang diatur dalam kebijakan publik.

Kolaborasi dapat berfokus pada manajemen publik. Dengan kesadaran kuat yang dimiliki secara bersama-sama oleh pihak pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya melalui kerja sama dan komunikasi, kolaborasi dapat menyelesaikan berbagai masalah manajemen publik dengan cara yang selaras

dengan kepentingan saat ini. Hal ini dimungkinkan karena kerja sama menumbuhkan “kepemilikan bersama” atas suatu masalah yang menjadikannya alat yang ideal untuk menyelesaikan tantangan.

Manajemen publik merupakan sebuah proses merealisasikan kebijakan publik, dimana kebijakan publik dalam penelitian ini yaitu ada pada Perda dan Perwali terkait pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara berkolaborasi antara Pemerintah Kota dan *stakeholders* lainnya. Pelaksanaan tugas dari manajemen publik dari birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dijalankan dengan berbagai strategi dengan melakukan kolaborasi yang dapat dilakukan melalui sebuah program. Pada urusan pengelolaan sampah dilakukan secara berkolaborasi, yaitu antara Pemerintah Kota dengan *stakeholders* lainnya. Kolaborasi menjadi suatu perspektif dan strategi dalam manajemen publik untuk penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

1.5.5 Kolaborasi

Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menggapai tujuan bersama dan merupakan teknik yang melibatkan dua pihak atau lebih. Kekuatan pendorong utamanya adalah kemampuan untuk mencapai hasil kelompok yang tidak dapat dicapai dengan upaya terpisah dari masing-masing anggota. Pihak-pihak yang berkolaborasi mencari inovasi, terobosan, dan pencapaian kelompok yang memuaskan. Kolaborasi diupayakan untuk memfasilitasi pertumbuhan saling pengertian dan pencapaian visi bersama. Prinsip-prinsip dasar kerja sama adalah

berbasis komunitas, jujur, empati, terbuka untuk diproses, bersedia bekerja sama, dan memiliki tujuan bersama.

Definisi kolaborasi pada sektor publik adalah kerja sama antara berbagai entitas yang kegiatannya terkait dengan upaya menghasilkan barang dan jasa publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak-hak publik; kejujuran; saling menguntungkan; kesamaan persepsi; kesediaan untuk berproses; dan hubungan yang berbasis komunitas. *Government, civil society, dan private sector* merupakan contoh entitas yang berkolaborasi. Meningkatkan layanan bagi masyarakat adalah tujuan utama dari kolaborasi sektor publik.

Menurut Ansell & Gash (2007:544), ada enam persyaratan penting dalam berkolaborasi:

1. Sebuah forum yang digunakan oleh badan atau entitas publik.
2. Aktor *non-state* termasuk di antara peserta forum.
3. Para peserta tidak hanya “dikonsultasikan” oleh badan publik, mereka secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Forum bertemu dalam bentuk kelompok dan terstruktur secara formal.
5. Forum berusaha untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan, meskipun pada kenyataannya tidak selalu tercapai.
6. Kebijakan atau manajemen publik merupakan inti dari kolaborasi.

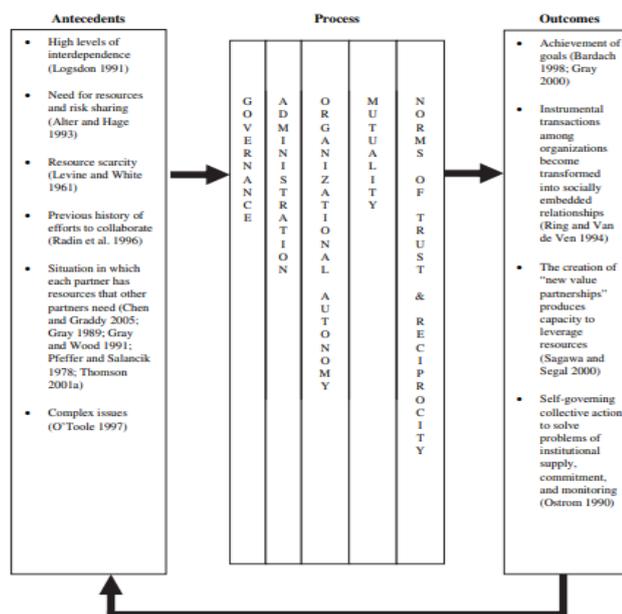
Kolaborasi didefinisikan oleh Ring & Van de Ven (dalam Thomson & Perry, 2006:23) sebagai sebuah proses yang melibatkan kontak yang saling menguntungkan dan norma-norma yang disepakati di antara para pemain otonom yang berinteraksi melalui diskusi formal dan informal. Mereka bersama-sama menetapkan prosedur dan kerangka kerja yang mengendalikan interaksi mereka dan menentukan bagaimana mengambil tindakan atau mencapai keputusan mengenai hal-hal yang menyatukan mereka. Thomson & Perry (2006:21) mendefinisikan kolaborasi sebagai sebuah proses kelompok di mana individu atau organisasi yang

memiliki ciri-ciri otonom kemudian bersatu untuk membentuk sebuah kesatuan berdasarkan interaksi yang saling menguntungkan dan adanya tujuan yang sama. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui negosiasi resmi dan tidak resmi yang dilakukan sesuai dengan rasa saling percaya dan pedoman yang telah ditetapkan.

Wood dan Gray (dalam Thomson & Perry, 2006:23) menggambarkan kolaborasi sebagai sebuah proses berpikir di mana individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu situasi mempertimbangkan berbagai sudut pandang mengenai masalah tertentu. Mereka kemudian merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul dari sudut pandang masing-masing, dengan tujuan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Menurut kerangka kerja proses untuk kolaborasi, interaksi formal dan informal antara organisasi berlangsung dari waktu ke waktu melalui serangkaian diskusi berulang, pembuatan komitmen, dan eksekusi. Pada literatur terdapat tiga teori kolaborasi yang sama-sama memandang kolaborasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan *outcomes*, yaitu:

A. Kerangka Model *Antecedents-Process-Outcomes* dalam Kolaborasi dari Wood & Gray (1991)

Wood dan Gray (dalam Thomson & Perry, 2006:21) mengembangkan model *Antecedents-Process-Outcomes* dalam kolaborasi yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Model Antecedents-Process-Outcomes dalam Kolaborasi dari Wood & Grey (1991)

Sumber: Wood & Gray (dalam Thomson & Perry, 2006:21)

Berdasarkan gambar di atas, maka kolaborasi terdiri dari tiga tahap yaitu di mana tiap-tiap tahap terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. *Antecedents* (Faktor-faktor yang mendahului), terdiri dari enam faktor yaitu:
 - a. *High level of interdependence* (Level yang tinggi dari saling ketergantungan), perbedaan kapasitas para aktor menumbuhkan rasa ketergantungan yang dapat memperkuat komitmen sehingga menjadi kunci penting agar hubungan berlangsung dengan baik.
 - b. *Need for resources and risk sharing* (Kebutuhan akan sumber-sumber dan berbagi risiko), setiap *stakeholders* memiliki kebutuhan sumber daya dari pihak lain maka perlu dilakukan kolaborasi dimana segala risiko ditanggung secara bersama oleh *stakeholders*.
 - c. *Resource scarcity* (Kelangkaan sumber-sumber), kolaborasi terjadi karena keterbatasan sumber daya.
 - d. *Previous history of efforts to collaborate* (Sejarah sebelumnya dari upaya-upaya kolaborasi).
 - e. *Situation in which each partner has resources that other partners need* (Situasi di mana tiap-tiap mitra memiliki sumber-sumber yang dibutuhkan mitra-mitra lainnya).
 - f. *Complex issues* (Masalah-masalah yang kompleks), masalah kompleks yang dihadapi pada situasi krisis tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja yang

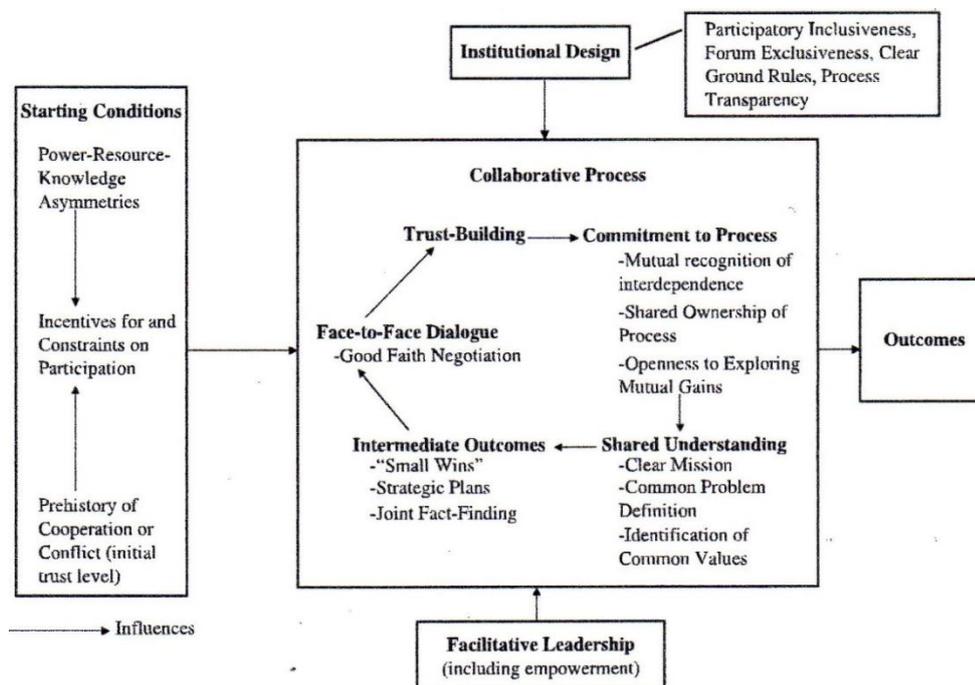
kemudian melibatkan lintas sektor sehingga kolaborasi menjadi strategi dalam mengatasi masalah yang kompleks.

2. *Process*, terdiri dari lima faktor yaitu:
 - a. *Governance* (Tata Kelola), berhubungan dengan pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*), pengaturan klasifikasi daya, dan *problem solving*.
 - b. *Administration* (Administrasi), indikatornya adalah penegasan peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak, produktivitas dalam pertemuan kerjasama, koordinasi tugas yang efektif, saluran komunikasi resmi, serta pengawasan dan pemantauan selama pelaksanaan kerjasama.
 - c. *Organizational outhority* (Otoritas/kewenangan organisasi), berperan sebagai kunci penting untuk menentukan intensitas interaksi antar organisasi.
 - d. *Mutuality* (Kebersamaan).
 - e. *Norms of trust and reciprocity* (Norma-norma dari kepercayaan dan timbal balik), kepercayaan menjadi kunci membangun kolaborasi yang efektif, terkadang kepercayaan menjadi tantangan kompleks dalam berkolaborasi.
3. *Outcomes*, terdiri dari empat faktor yaitu:
 - a. *Achievement of goals* (Pencapaian tujuan), penyatuan visi dan misi antar aktor sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan yang telah disepakati pada awal berkolaborasi.
 - b. *Instrumental transaction among organizations become transformed into socially embedded relationship* (Transaksi instrumental antar organisasi diubah menjadi hubungan yang tertanam secara sosial).
 - c. *The creations of "new value partnership" produces capacity to leverage resources* (Penciptaan "nilai baru kemitraan" yang menghasilkan kapasitas untuk memanfaatkan sumber-sumber).
 - d. *Self-governing collective action to solve problems of institutional supply, commitment, and monitoring* (Tindakan kolektif yang mengatur diri sendiri untuk memecahkan masalah pasokan, komitmen, dan monitoring).

B. Kerangka Model *Starting Conditions-Collaborative Process-Outcomes* dalam

Kolaborasi dari Ansell & Gash (2007)

Ansell & Gash (2007:550) mengembangkan kerangka model *Starting Conditions-Collaborative Process-Outcomes* dalam kolaborasi yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 3 Model Starting Conditions-Collaborative Process-Outcomes dalam Kolaborasi dari Ansell & Gash (2007)

Sumber: Ansell & Gash (2007:550)

Berdasarkan gambar di atas, maka kolaborasi terdiri dari lima tiga tahap di mana tiap-tiap tahap terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. *Starting condition* (Kondisi awal), memengaruhi proses sebelum kolaborasi terjadi, termuat keadaan dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antar *stakeholders*. Kondisi awal terdiri dari tiga faktor yaitu:
 - a. *Power-resource-knowledge asymmetries* (Kekuasaan-sumber-pengetahuan yang tidak simetris).
 - b. *Incentive for and constraints on participation* (Insentif untuk dan hambatan-hambatan dalam partisipasi).
 - c. *Pre-history of cooperation or conflict (initial trust level)* (Sejarah sebelumnya dalam koordinasi dan konflik atau tingkat kepercayaan awal).
2. *Collaborative process* (Proses kolaboratif), terdiri dari lima faktor yaitu:
 - a. *Face-to-face dialogue* (Dialog tatap muka), proses ini difokuskan untuk mencapai kesepakatan. Dialog tatap muka biasanya digunakan untuk menemukan peluang dengan menyajikan narasi semua pihak yang terlibat dalam skenario "saling menguntungkan" jika para *stakeholders* dapat berkolaborasi. Dialog tatap muka menjadi metode untuk meningkatkan komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi.

- b. *Trust-building* (Membangun kepercayaan), merupakan suatu proses yang memerlukan investasi waktu yang signifikan dan tingkat komitmen yang tinggi. Proses ini tidak dapat dijalankan tanpa adanya komunikasi langsung antara pihak-pihak terlibat. Membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan merupakan keterampilan yang sangat penting bagi para pemimpin kolaboratif.
- c. *Commitment to process* (Komitmen terhadap proses), tingkat ketergantungan yang tinggi di antara para *stakeholders* cenderung memperkuat komitmen mereka untuk berkolaborasi. Penting untuk diingat bahwa kolaborasi merupakan proses berkelanjutan dari kegiatan bersama yang saling menguntungkan, bukan kesepakatan yang hanya terjadi sekali.
- d. *Shared understanding* (Pemahaman bersama), para *stakeholders* harus dapat mencapai kesepakatan tentang apa yang dapat dicapai pada suatu waktu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya tujuan bersama yang terdefinisi dengan baik, deskripsi yang tepat mengenai masalah yang dihadapi, dan pemahaman bersama mengenai manfaat bekerja sama yang dapat dicapai melalui kolaborasi.
- e. *Intermediate outcomes* (Hasil antara), ketika hasil antara dari proses kolaborasi dapat diukur meskipun masih sebuah hasil antara (pertengahan), maka ada kemungkinan lebih besar untuk melanjutkan kolaborasi. Keberhasilan kecil (*small win*) ini dapat berperan sebagai pemicu untuk mengembangkan komitmen dan kepercayaan bersama di antara para *stakeholders*.

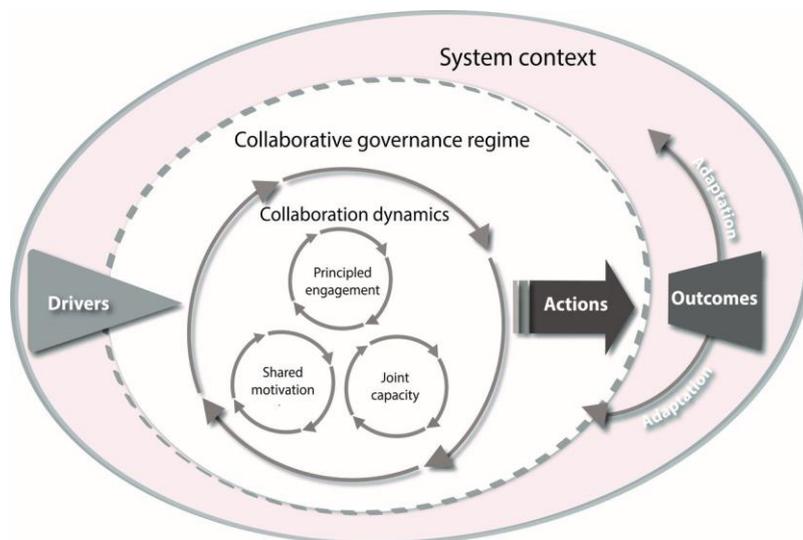
Collaborative process (Proses kolaboratif) tersebut didukung oleh dua faktor yaitu:

- 1) *Facilitative leadership (including empowerment)* (Kepemimpinan fasilitatif, termasuk pemberdayaan).
- 2) *Institutional design* (Desain institusi), terdiri dari empat faktor yaitu:
 - a) *Participatory inclusiveness* (Partisipasi yang inklusif).
 - b) *Forum exclusiveness* (Forum yang eksklusif).
 - c) *Clear ground rule* (Kejelasan aturan-aturan dasar).
 - d) *Process transparency* (Proses yang transparan).
3. *Outcomes* (Hasil), yaitu hasil-hasil dari kolaborasi.

C. Kerangka Model *Integrative Framework for Collaborative Governance* dari

Emerson & Nabatchi (2015)

Emerson & Nabatchi (2015:27) mengembangkan model *Integrative Framework for Collaborative Governance* yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Model Integrative Framework for Collaborative Governance dari Emerson & Nabatchi (2015)

Sumber: Emerson & Nabatchi (2015:27)

Berdasarkan gambar di atas, maka dalam model *Collaborative Governance* dari Emerson & Nabatchi (2015:27) terdapat enam tahap di mana tiap-tiap tahap terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. *System context* (konteks sistem), terdiri dari enam faktor yaitu:
 - a. *Public service and resources condition* (Kondisi pelayanan publik dan sumber-sumber). *Public service condition* dapat berupa kualitas layanan publik dalam berbagai bidang, sedangkan *resources condition* dapat berupa kondisi lingkungan alam, kondisi sumber daya buatan manusia, kecukupan sumber-sumber daya, dan lain-lain (Emerson & Nabatchi, 2015:40-41).
 - b. *Policy and legal framework* (Kerangka kerja kebijakan dan hukum). *Policy and legal framework* meliputi hukum substantif, peraturan, regulasi, mandat, peraturan eksekutif, memorandum pedoman kebijakan, dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber daya dan layanan publik, serta ketentuan prosedural yang akan mempengaruhi peluang terjadinya *collaborative governance* secara lintas batas (Emerson & Nabatchi, 2015:41).
 - c. *Socioeconomic and cultural characteristic* (Karakteristik sosio-ekonomi dan budaya). *Socioeconomic and cultural characteristics* meliputi berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang akan berkontribusi terhadap kualitas dari dan masalah-masalah dalam sumber-sumber daya dan layanan publik. Selain itu, *socioeconomic and cultural characteristics* juga meliputi sumber-sumber finansial dan informasi serta tingkat kompleksitasnya yang

- harus diatasi melalui pengambilan keputusan secara kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015:42).
- d. *Network characteristics* (Karakteristik jaringan kerja). Menunjukkan jaringan kerja yang menghubungkan pihak-pihak yang berkolaborasi, termasuk kekuatan hubungan dan frekuensi interaksi di antara pihak-pihak yang berkolaborasi tersebut (Emerson & Nabatchi, 2015:42).
 - e. *Political dynamic and power relations* (Dinamika politik dan hubungan kekuasaan). Memiliki banyak sumber seperti mekanisme kontrol organisasi, sumber-sumber daya finansial dan pertanggungjawaban, proses pendanaan, dan standar operasi prosedur organisasi (Emerson & Nabatchi, 2015:43).
 - f. *History of conflict* (Sejarah konflik). Konflik yang pernah terjadi antar pihak-pihak yang berkolaborasi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan di antara mereka (Emerson & Nabatchi, 2015:43).
2. *Drivers* (Penggerak), terdiri dari empat faktor yaitu:
 - a. *Uncertainty* (Ketidakpastian)
 - b. *Interdependence* (Saling ketergantungan). *Interdependence* menjadi sangat penting dalam kolaborasi manakala otoritas publik atau organisasi nonpemerintah gagal dalam menyelesaikan masalah publik atau memenuhi kebutuhan publik melalui upaya internal organisasi dengan menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya sendiri. Hak itu kemudian mendorong mereka mencari badan-badan atau sektor-sektor lainnya untuk berkolaborasi (Emerson & Nabatchi, 2015:45).
 - c. *Consequential incentive* (Konsekuensi dari insentif)
 - d. *Initiating leadership* (Kepemimpinan yang memprakarsai). Kepemimpinan yang memiliki visi strategis, profesional, memiliki *social networks* yang luas, kredibel, dapat dipercaya, memiliki komitmen, memiliki otoritas formal dan informal, serta memiliki cara-cara yang inklusif dalam menyelesaikan masalah (Emerson & Nabatchi, 2015:47). Cara-cara inklusif ini antara lain pemimpin tersebut memiliki daya inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah.
 3. *Collaborative Dynamic* (Dinamika kolaborasi), terdiri dari:
 - a. *Principled engagement* (Keterlibatan secara prinsipil), terdiri dari *discovery* (penemuan), *definition* (penentuan), *deliberation* (musyawarah), dan *determination* (penetapan).
 - b. *Shared motivation* (Motivasi bersama), terdiri dari *trust* (kepercayaan), *mutual understanding* (saling pengertian), *internal legitimacy* (legitimasi internal), dan *commitment* (komitmen).
 - c. *Capacity for joint action* (Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama), terdiri dari *procedural and institutional arrangements* (penyusunan prosedur dan kelembagaan), *leadership* (kepemimpinan), *knowledge* (pengetahuan), dan *resources* (sumber-sumber)
 4. *Actions* (Tindakan-tindakan), terdiri dari sembilan faktor yaitu:
 - a. *Securing endorsement* (Mengamankan dukungan)
 - b. *Enacting new policy measure, laws and regulation* (Memberlakukan kebijakan, hukum dan regulasi baru)
 - c. *Marshalling external resources* (Menyusun sumber-sumber daya eksternal)

- d. *Deploying staff* (Mengerahkan staf)
 - e. *Sitting and permitting facilities* (Menempatkan dan mengizinkan fasilitas)
 - f. *Building or clean up sites* (Membangun atau membersihkan situs)
 - g. *Carrying out new management practice* (Melaksanakan praktik manajemen baru)
 - h. *Monitoring implementation* (Monitoring implementasi)
 - i. *Enforcing compliance* (Menegakkan kepatuhan)
5. *Outcomes* (Hasil-hasil), terdiri dari empat faktor yaitu:
- a. *Changes in system context* (perubahan-perubahan dalam konteks sistem)
 - b. *Changes in Collaborative Governance Regime/CGR* (Perubahan-perubahan pada rejim *Collaborative Governance*)
 - c. *Improvement in quality or quantity of public goods* (Perbaikan dalam kualitas dan kuantitas barang publik)
 - d. *Physical or nonphysical changes* (Perubahan-perubahan fisik atau nonfisik)
- Berdasarkan *outcomes* di atas, maka dilakukan *adaptation* (penyesuaian) yang terdiri dari tiga faktor yaitu:
- a. *Adaptation in system context* (Penyesuaian dalam konteks sistem).
 - b. *Adaptation in Collaborative Governance Regime/CGR* (Penyesuaian dalam rejim *Collaborative Governance*).
 - c. *Adaptation in dynamics collaborative* (Penyesuaian dalam dinamika kolaboratif).

Kolaborasi dalam penelitian ini adalah kerjasama atau kemitraan antara Pemerintah Kota Cirebon c.q. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya. Kolaborasi pada penelitian ini difokuskan pada pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola limbah guna mengatasi tantangan limbah yang menjadi permasalahan publik di wilayah tersebut.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan tiga kriteria teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), dan Emerson & Nabatchi (2015). Ketiga teori tersebut memiliki kesamaan yaitu bahwa kolaborasi terdiri dari tiga tahap yaitu *input*, *process*, dan *outcomes* tetapi dengan istilah yang berbeda yaitu:

Tabel 1. 7 Perbedaan Istilah Input, Process, dan Outcomes dari Tiga Pakar yang Mengemukakan Teori Kolaborasi

No.	Pakar	Input (Masukan)	Process (Proses)	Outcomes (Hasil-hasil)
1.	Wood & Gray (1991)	<i>Antecedents</i> (Faktor-faktor yang mendahului)	<i>Process</i> (Proses)	<i>Outcomes</i> (Hasil-hasil)
2.	Ansell & Gash (2007)	<i>Starting conditions</i> (Kondisi-kondisi awal)	<i>Collaborative process</i> (Proses kolaboratif)	<i>Outcomes</i> (Hasil-hasil)
3.	Emerson & Nabatchi (2015)	<i>System context</i> (Konteks sistem) dan <i>Drivers</i> (Faktor-faktor penggerak)	<i>Collaboration dynamics</i> (Dinamika kolaborasi) dan <i>Actions</i> (Tindakan-tindakan)	<i>Outcomes</i> (Hasil-hasil)

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang menjadi *input*, *process*, dan *outcomes* pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya yaitu:

1. *Input* (Masukan)

Input dalam teori Wood & Gray (1991) disebut *antecedents* (faktor-faktor yang mendahului), dalam teori Ansell & Gash (2007) disebut *starting conditions* (kondisi-kondisi awal), sedangkan dalam teori Emerson & Nabatchi (2015) disebut *system context* (konteks sistem) dan *drivers* (faktor-faktor penggerak). *Input* menurut ketiga pakar tersebut memiliki kriteria yaitu:

Tabel 1. 8 Kriteria *Input* Menurut Ketiga Pakar

No.	Pakar	<i>Input</i>	Kriteria
1.	Wood & Gray (1991)	<i>Antecedents</i> (Faktor-faktor yang mendahului)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>High level of interdependence</i> (Level yang tinggi dari saling ketergantungan). 2. <i>Need for resources and risk sharing</i> (Kebutuhan akan sumber-sumber dan berbagi risiko). 3. <i>Resource scarcity</i> (Kelangkaan sumber-sumber). 4. <i>Previous history of efforts to collaborate</i> (Sejarah sebelumnya dari upaya-upaya kolaborasi). 5. <i>Situation in which each partner has resources that other partners need</i> (Situasi di mana tiap-tiap mitra memiliki sumber-sumber yang dibutuhkan mitra-mitra lainnya). 6. <i>Complex issues</i> (Masalah-masalah yang kompleks).
2.	Ansell & Gash (2007)	<i>Starting conditions</i> (Kondisi-kondisi awal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Power-resource-knowledge asymmetries</i> (Kekuasaan-sumber-pengetahuan yang tidak simetris). 2. <i>Incentive for and constraints on participation</i> (Insentif untuk dan hambatan-hambatan dalam partisipasi). 3. <i>Prehistory of cooperation or conflict (initial trust level)</i> (Sejarah sebelumnya dalam koordinasi dan konflik atau tingkat kepercayaan awal).
3.	Emerson & Nabatchi (2015)	<i>System context</i> (Konteks sistem) dan <i>Drivers</i> (Faktor-faktor penggerak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>System context</i> (konteks sistem): <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Public service and resources condition</i> (Kondisi pelayanan publik dan sumber-sumber) b. <i>Policy and legal framework</i> (Kerangka kerja kebijakan dan hukum)

No.	Pakar	Input	Kriteria
			<ul style="list-style-type: none"> c. <i>Socioeconomic and cultural characteristic</i> (Karakteristik sosio-ekonomi dan budaya) d. <i>Network characteristics</i> (Karakteristik jaringan kerja) e. <i>Political dynamic and power relations</i> (Dinamika politik dan hubungan kekuasaan) g. <i>History of conflict</i> (Sejarah konflik) 2. <i>Drivers</i> (Penggerak): <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Uncertainty</i> (Ketidakpastian) b. <i>Interdependence</i> (Saling ketergantungan) c. <i>Consequential incentive</i> (Konsekuensi dari insentif) d. <i>Initiating leadership</i> (Kepemimpinan yang memprakarsai)

2. *Process* (Proses)

Process dalam teori Wood & Gray (1991) disebut *Process* (Proses), dalam teori Ansell & Gash (2007) disebut *Collaborative process* (Proses kolaboratif), sedangkan dalam teori Emerson & Nabatchi (2015) disebut *Collaborative dynamics* (Dinamika kolaboratif) dan *Actions* (Tindakan-tindakan). Proses menurut ketiga pakar tersebut memiliki kriteria yaitu:

Tabel 1. 9 Kriteria *Process* Menurut Ketiga Pakar

No.	Pakar	Proses	Kriteria
1.	Wood & Gray (1991)	<i>Process</i> (Proses)	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Tata Kelola</i> (<i>Governance</i>). 2. <i>Administration</i> (Administrasi). 3. <i>Organizational authority</i> (Otoritas/kewenangan organisasi). 4. <i>Mutuality</i> (Kebersamaan).

No.	Pakar	Proses	Kriteria
			5. <i>Norms of trust and reciprocity</i> (Norma-norma dari kepercayaan dan timbal balik).
2.	Ansell & Gash (2007)	<i>Collaborative process</i> (Proses kolaboratif)	1. <i>Face-to-face dialogue</i> (Dialog tatap muka). 2. <i>Trust-building</i> (Membangun kepercayaan). 3. <i>Commitment to process</i> (Komitmen terhadap proses). 4. <i>Shared understanding</i> (Pemahaman bersama). 5. <i>Intermediate outcomes</i> (Hasil antara). <i>Collaborative process</i> (Proses kolaboratif) didukung oleh: 1. <i>Facilitative leadership (including empowerment)</i> (Kepemimpinan fasilitatif, termasuk pemberdayaan). 2. <i>Institutional design</i> (Desain institusi): a. <i>Participatory inclusiveness</i> (Partisipasi yang inklusif). b. <i>Forum exclusiveness</i> (Forum yang eksklusif). c. <i>Clear ground rule</i> (Kejelasan aturan-aturan dasar). d. <i>Process transparency</i> (proses yang transparan).
3.	Emerson & Nabatchi (2015)	<i>Collaborative dynamics</i> (Dinamika kolaboratif) dan <i>Actions</i> (Tindakan-tindakan)	1. <i>Collaborative Dynamic</i> (Dinamika kolaborasi): a. <i>Principled engagement</i> (Keterlibatan secara prinsipil), terdiri dari <i>discovery</i> (penemuan), <i>definition</i> (penentuan), <i>deliberation</i> (musyawarah), dan <i>determination</i> (penetapan). b. <i>Shared motivation</i> (Motivasi bersama), terdiri dari <i>trust</i> (kepercayaan), <i>mutual understanding</i> (saling pengertian), dan <i>internal legitimacy</i> (legitimasi)

No.	Pakar	Proses	Kriteria
			<p>internal), dan <i>commitment</i> (Komitmen)</p> <p>c. <i>Capacity for joint action</i> (Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama), terdiri dari <i>procedural and institutional arrangements</i> (penyusunan prosedur dan kelembagaan), <i>leadership</i> (kepemimpinan), <i>knowledge</i> (pengetahuan), dan <i>resources</i> (sumber-sumber)</p> <p>2. <i>Actions</i> (Tindakan-tindakan):</p> <p>a. <i>Securing endorsement</i> (Mengamankan dukungan)</p> <p>b. <i>Enacting new policy measure, laws and regulation</i> (Memberlakukan kebijakan, hukum dan regulasi baru)</p> <p>c. <i>Marshalling external resources</i> (Menyusun sumber-sumber daya eksternal)</p> <p>d. <i>Deploying staff</i> (Mengerahkan staf)</p> <p>e. <i>Sitting and permitting facilities</i> (Menempatkan dan mengizinkan fasilitas)</p> <p>f. <i>Building or clean up sites</i> (Membangun atau membersihkan situs)</p> <p>g. <i>Carrying out new management practice</i> (Melaksanakan praktik manajemen baru)</p> <p>h. <i>Monitoring implementation</i> (Monitoring implementasi)</p> <p>i. <i>Enforcing compliance</i> (Menegakkan kepatuhan)</p>

3. *Outcomes* (Hasil-hasil)

Istilah *outcomes* dalam teori Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007) dan Emerson & Nabatchi (2015) sama-sama disebut *outcomes* dengan kriteria yaitu:

Tabel 1. 10 Kriteria *Outcomes* Menurut Ketiga Pakar

No.	Pakar	<i>Outcomes</i>	Kriteria
1.	Wood & Gray (1991)	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Achievement of goals</i> (Pencapaian tujuan). 2. <i>Instrumental transaction among organizations become transformed into socially embedded relationship</i> (Transaksi instrumental antar organisasi diubah menjadi hubungan yang tertanam secara sosial). 3. <i>The creations of "new value partnership" produces capacity to leverage resources</i> (Penciptaan "nilai baru kemitraan" yang menghasilkan kapasitas untuk memanfaatkan sumber-sumber). 4. <i>Self-governing collective action to solve problems of institutional supply, commitment, and monitoring</i> (Tindakan kolektif yang mengatur diri sendiri untuk memecahkan masalah pasokan, komitmen, dan monitoring).
2.	Ansell & Gash (2007)	<i>Outcomes</i>	Tidak menyebutkan kriterianya
3.	Emerson & Nabatchi (2015)	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Changes in system context</i> (perubahan-perubahan dalam konteks sistem) 2. <i>Changes in Collaborative Governance Regime/CGR</i> (Perubahan-perubahan pada rezim <i>Collaborative Governance</i>) 3. <i>Improvement in quality or quantity of public goods</i>

No.	Pakar	<i>Outcomes</i>	Kriteria
			(Perbaikan dalam kualitas dan kuantitas barang publik) 4. <i>Physical or nonphysical changes</i> (Perubahan-perubahan fisik atau nonfisik)

1.5.6 Pengelolaan Sampah

Sampah adalah residu padat yang tersisa dari aktivitas manusia dan/atau proses alam. Menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah aktivitas yang terencana, holistik, dan berkelanjutan yang mencakup upaya pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah meliputi dua kategori kegiatan:

1. Pengurangan sampah, yaitu aktivitas yang terorganisir, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup mengurangi jumlah sampah (*reduce*), mengolah kembali sampah (*recycle*), dan memanfaatkan kembali sampah (*reuse*). Praktik pengurangan sampah dapat dilakukan melalui:
 - a) Menggunakan bahan yang dapat secara alami terurai, dapat didaur ulang, atau dapat digunakan kembali.
 - b) Mengumpulkan dan mengembalikan kemasan dan/atau limbah produk bekas.
2. Penanganan sampah, yaitu aktivitas yang terorganisir, menyeluruh, dan berlangsung secara berkelanjutan yang melibatkan proses pemisahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penanganan akhir sampah.

Pengelolaan sampah dilakukan dan menjadi kewajiban dan tanggung jawab entitas organisasi, lingkungan, serta Pemerintah Kota. Sesuai dengan ketetapan

hukum yang berlaku, Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan sampah, atau dapat menjalin kemitraan dengan badan usaha.

1.5.7 Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam konteks pelayanan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan berbentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa TJSL merupakan dedikasi perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat lokal, maupun masyarakat umum. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa TJSL adalah suatu kebijakan nasional yang merupakan tanggung jawab bersama untuk melakukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, perusahaan, dan masyarakat (Putusan MK Nomor 53 PUU-VI-2008, h.89).

Menurut Siagian (2000:27), tanggung jawab sosial didasari oleh pemikiran bahwa tidak ada organisasi yang dapat maju dan berkembang tanpa adanya kepercayaan dan dukungan dari lingkungannya. Ada banyak cara untuk memenuhi tanggung jawab sosial seseorang: dengan bekerja, dengan menggunakan masyarakat di sekitar Anda sebagai sumber bahan baku, dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum, dan dengan secara aktif berkontribusi pada pengembangan masyarakat di sekitar.

Mardikanto (2018:92), menggambarkan bahwa CSR adalah gagasan bahwa perusahaan dapat mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan dengan secara sukarela memasukkan isu-isu sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan. Hadi (2011:31) menegaskan bahwa CSR penting untuk dilakukan karena perusahaan adalah sebuah keluarga besar yang memiliki tujuan yang harus dipenuhi dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Setiap kegiatan yang dilakukan organisasi membutuhkan apresiasi dan partisipasi anggota masyarakat. Oleh karena itu, bisnis merupakan subsistem dari sistem siklus kehidupan masyarakat yang membutuhkan pola interaksi yang teratur dengan subsistem lainnya.

Untung (2008:87) mendeskripsikan terdapat beberapa manfaat dalam penerapan CSR dengan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan citra merek dan reputasi bisnis.
- b. Menurunkan risiko bisnis bagi perusahaan.
- c. Menciptakan prospek pasar yang lebih luas.
- d. Meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Meningkatkan produktivitas dan semangat kerja karyawan.
- f. Kesempatan untuk memenangkan penghargaan.

Mardikanto (2018:132), menjelaskan beberapa manfaat CSR yaitu:

1. Manfaat untuk masyarakat

Perusahaan dapat membantu meningkatkan standar hidup masyarakat dengan menyadari kebutuhan mereka. Masyarakat mendapatkan keuntungan dari CSR

karena dapat tumbuh baik secara pribadi maupun komersial, yang membantu masyarakat mencapai tujuan kesejahteraannya.

2. Manfaat bagi pemerintah

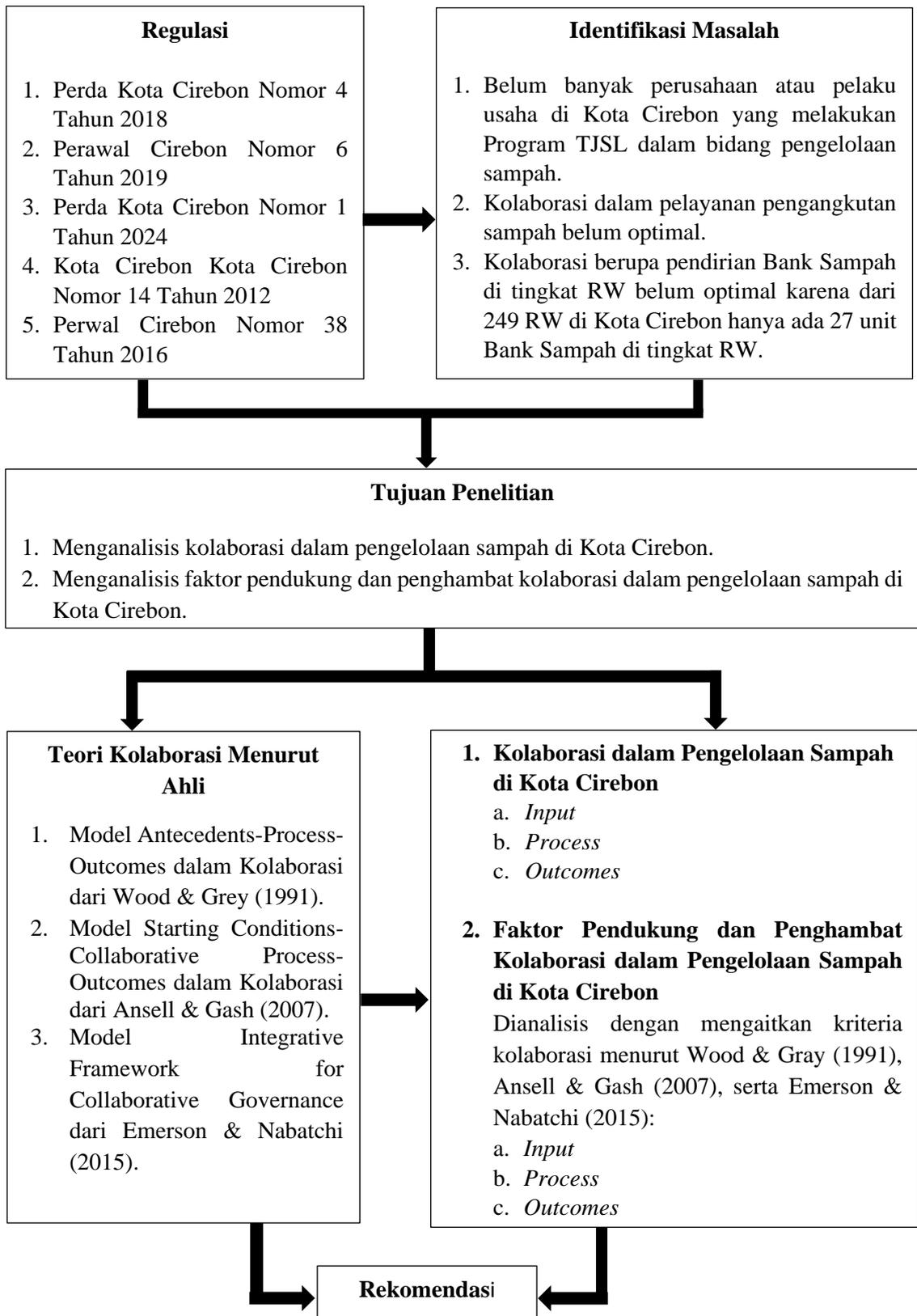
Melalui CSR, kemitraan antara pemerintah dan bisnis dapat dibangun untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan, pendidikan yang tidak memadai, akses yang terbatas ke layanan kesehatan, dan sebagainya.

3. Manfaat CSR bagi perusahaan

Implementasi CSR yang benar akan memberikan manfaat secara keberlanjutan bagi bisnis dengan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan citra perusahaan.
- c. Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
- d. Membuka akses untuk investasi serta pembiayaan bagi perusahaan.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan sebuah kegiatan menguraikan konsep penelitian menjadi komponen-komponen yang mudah diukur dan dipahami untuk menyelaraskannya dengan konsep-konsep teoritis yang telah dibahas sebelumnya. Pada penelitian ini, berdasarkan teori kolaborasi yang telah diuraikan, kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon dianalisis dengan menggunakan teori-teori kolaborasi dari Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), serta Emerson & Nabatchi (2015) yang dilihat dari beberapa fenomena, kemudian untuk sub kriteria penelitian ini disesuaikan dengan hasil observasi di lapangan, yaitu dengan sebagai berikut:

A. Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

1. *Input*

- a. Komitmen Pemerintah Kota dan *stakeholders* lainnya terhadap permasalahan sampah sebagai permasalahan bersama. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), yaitu *complex issues* (masalah-masalah yang kompleks).
- b. Kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota dengan *stakeholders* lainnya. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015), yaitu *system context* (konteks sistem) yang memuat *policy and legal framework* (kerangka kerja kebijakan dan hukum).
- c. Saling ketergantungan antara Pemerintah Kota dengan *stakeholders* lainnya. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991),

yaitu *high level of interdependence* (tingkat saling ketergantungan yang tinggi) dan teori kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015), yaitu *drivers* (penggerak) yang memuat *interdependence* (saling ketergantungan).

- d. Ketercukupan dan kondisi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), yaitu *resource scarcity* (kelangkaan sumber daya), dan teori kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015), yaitu *system context* (konteks sistem) yang memuat *public service and resources condition* (kondisi pelayanan publik dan sumber-sumber).

2. Process

- a. Komunikasi berupa dialog tatap muka (*face to face dialogue*) antara Pemerintah Kota dengan *stakeholders* lainnya. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Ansell & Gash (2007), yaitu *face to face dialogue* (dialog tatap muka) dan teori kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015) yaitu *collaborative dynamic* (dinamika kolaborasi) yang memuat *principled engagement* (keterlibatan secara prinsipil), terdiri dari *deliberation* (musyawarah).
- b. Membangun kepercayaan (*trust building*) antara Pemerintah Kota dengan *stakeholders* lainnya. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Ansell & Gash (2007), yaitu *trust building* (membangun kepercayaan) dan teori kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015) yaitu *collaborative*

dynamic (dinamika kolaborasi) yang memuat *shared motivation* (motivasi bersama) terdiri dari *trust* (kepercayaan).

- c. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*) yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota dengan *stakeholders* lainnya. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Ansell & Gash (2007), yaitu *commitment to process* (komitmen terhadap proses) dan teori kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015) yaitu *collaborative dynamic* (dinamika kolaborasi) yang memuat *shared motivation* (motivasi bersama) terdiri dari *commitment* (komitmen).
- d. Pemahaman bersama (*shared understanding*) yang tercipta antara Pemerintah Kota dengan *stakeholders* lainnya. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Ansell & Gash (2007), yaitu *shared understanding* (pemahaman bersama).
- e. Kemampuan pemimpin dalam mengkolaborasikan dengan *stakeholders* lainnya pada pengelolaan sampah. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Ansell & Gash (2007), yaitu *facilitative leadership including empowerment* (kepemimpinan fasilitatif, termasuk pemberdayaan) dan teori kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015) yaitu *drivers* (penggerak) yang memuat *initiating leadership* (kepemimpinan yang memprakarsai) serta *collaborative dynamic* (dinamika kolaborasi) yang memuat *capacity for joint action* (kapasitas untuk melakukan tindakan bersama) terdiri dari *leadership* (kepemimpinan).

- f. Tata Kelola (*Governance*) dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), yaitu *governance* (tata kelola).

3. *Outcomes* (Hasil-hasil)

Sub kriteria ini berasal dari teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), yaitu *achievement of goals* (pencapaian tujuan), teori kolaborasi menurut Ansell & Gash (2015) yaitu *outcomes* (hasil-hasil), dan teori kolaborasi menurut Emerson & Nabatchi (2015) yaitu *outcomes* (hasil-hasil) yang terdiri dari faktor *improvement in quality or quantity of public goods* (perbaikan dalam kualitas dan kuantitas barang publik). Oleh karena itu, kriteria *outcomes* dalam penelitian ini yaitu:

- a. Hasil-hasil kolaborasi dalam pengelolaan sampah dilihat secara kuantitas (jumlah).
- Meningkatnya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Cirebon.
 - Tercapainya target pada Perwal dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- b. Hasil-hasil kolaborasi dalam pengelolaan sampah dilihat secara kualitas (mutu).
- Kualitas pengelolaan sampah.
 - Perbaikan kualitas kebersihan lingkungan.
 - Manfaat yang dirasakan dari partisipasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - Penghargaan bagi *stakeholders* yang telah berhasil melakukan program pengelolaan sampah.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

Masing-masing faktor pendukung dan faktor penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon ini dianalisis dengan mengaitkan atau menghubungkan dengan kriteria dan sub kriteria dari *Input*, *Process*, dan *Outcomes* berdasarkan teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), serta Emerson & Nabatchi (2015).

1.8 Argumen Penelitian

Sampah merupakan tantangan serius di Kota Cirebon, dimana DLH Kota Cirebon perlu mengatasi sekitar 200 ton sampah per harinya. Kota Cirebon juga hanya memiliki satu TPA sehingga dengan jumlah angkutan dan volume sampah yang ada, maka daya tampung TPA saat ini sudah mencapai volume maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana serta baik sumber daya finansial yang dimiliki oleh DLH selaku pihak pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah yang mengkhawatirkan menjadi alasan kolaborasi dengan *stakeholders* lainnya penting untuk dilakukan. Hal ini karena tumpukan sampah yang ada dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan keindahan kota. Penelitian ini dimaksudkan mampu menghadirkan rekomendasi atau saran bagi Pemerintah Kota dan *stakeholders* lainnya untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diungkapkan melalui wawancara atau catatan tertulis dari partisipan (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2018:4). Metode penelitian kualitatif menggabungkan usaha-usaha utama, seperti melakukan kajian pertanyaan dan teknik, memperoleh data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari elemen-elemen khusus ke konsep-konsep yang lebih umum, serta menafsirkan relevansi data (Creswell, 2014:4). Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena kompleks dan dinamisnya permasalahan yang diteliti sehingga perolehan data yang didapat dari narasumber perlu dijaring menggunakan metode yang lebih alamiah seperti wawancara. Data yang dikumpulkan berupa teks, gambar, dan bukan angka. Oleh karena itu, penyajian data menggunakan penjelasan naratif dan deskripsi visual karena fokus penelitian hanya pada penggambaran kejadian.

1.9.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melaksanakan penelitiannya. Penelitian ini secara khusus mengambil lokasi pada:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
2. Perwakilan perusahaan dan *stakeholders* lainnya yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah.

Stakeholders yang dipilih oleh peneliti yaitu Rumah Zakat Cirebon yang berkolaborasi dengan Complete Seluler karena menjalankan program TJSL dalam program bank sampah di beberapa kelurahan. Selanjutnya, PT. Pegadaian Cirebon karena memiliki program menarik Clean & Gold mengubah sampah menjadi tabungan emas yang berlangsung di beberapa kelurahan. Lalu, terdapat Dinas Sosial Kota Cirebon sebagai perwakilan *stakeholders* yang telah menjalin kerja sama dalam pengangkutan sampah dengan DLH Kota Cirebon.

3. Perwakilan Bank Sampah di Kota Cirebon.

Bank sampah yang diteliti yaitu Bank Sampah Edelweis RW 10 Kanoman Utara dan Bank Sampah RW 08 Merbabu Asih. Peneliti mengambil lokus penelitian pada bank sampah ini karena kedua bank sampah tersebut merupakan bank sampah percontohan di Kota Cirebon yang berhasil.

4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kopi Luhur Kota Cirebon.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang digunakan sebagai informan penelitian. Teknik sampling digunakan dalam menentukan subjek penelitian. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2014:121). Banyak strategi sampling yang digunakan untuk memilih sampel yang akan diaplikasikan dalam penelitian. Secara umum, terdapat dua jenis teknik sampling yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. *Probability Sampling* memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel ketika pengambilan sampel digunakan. *Nonprobability Sampling* adalah metode

pengambilan sampel di mana tidak setiap elemen atau orang dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik sampel ini meliputi: *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling insidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2014:122).

Pemilihan subjek penelitian ini dijalankan dengan menerapkan teknik *Nonprobability sampling* yang meliputi *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan suatu pengkajian tertentu (Sugiyono, 2014:126). Pada penelitian ini, sampel dipilih dari individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh pihak yang memahami terkait kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

1.9.4 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari tiga kriteria teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), dan Emerson & Nabatchi (2015). Ketiga teori tersebut memiliki kesamaan yaitu bahwa kolaborasi terdiri dari tiga tahap yaitu *input*, *process*, dan *outcomes* tetapi dengan istilah yang berbeda. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang menjadi *input*, *process*, dan *outcomes* pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 11 Fenomena Penelitian

No.	Tujuan/ Fokus	Fenomena	Gejala yang Diamati
1.	Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon	<i>Input</i>	Menganalisis komitmen Pemkot dan <i>stakeholders</i> lainnya akan permasalahan sampah, kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur kolaborasi dalam pengelolaan sampah, saling ketergantungan antara Pemkot dengan <i>stakeholders</i> lainnya, serta ketercukupan dan kondisi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Pemkot.
		<i>Process</i>	Menganalisis komunikasi berupa dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama antara Pemkot dengan <i>stakeholders</i> lainnya, dan kemampuan pemimpin dalam mengkolaborasikan dengan <i>stakeholders</i> lainnya dalam pengelolaan sampah, serta <i>governance</i> dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah.
		<i>Outcomes</i>	Menganalisis hasil-hasil kolaborasi dalam pengelolaan sampah dilihat secara kuantitas (jumlah) dan hasil-hasil kolaborasi dalam pengelolaan sampah dilihat secara kualitas (mutu).
2.	Faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon	Faktor-faktor pendukung kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon	Menganalisis faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Pemkot dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh <i>stakeholders</i> lainnya. Faktor pendukung ini dianalisis melalui cara mengaitkan dengan kriteria dan sub kriteria dari <i>Input</i> , <i>Process</i> , dan <i>Outcomes</i> berdasarkan teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), serta Emerson & Nabatchi (2015).

		Faktor-faktor penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon	Menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemkot Cirebon dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi <i>stakeholders</i> lainnya. Faktor penghambat ini dianalisis melalui cara mengaitkan dengan kriteria dan sub kriteria dari <i>Input, Process, dan Outcomes</i> berdasarkan teori kolaborasi menurut Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), serta Emerson & Nabatchi (2015).
--	--	--	---

1.9.5 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Data Angka, meliputi jumlah, frekuensi, dan lain-lain.
- b) Data Tertulis, meliputi data berupa uraian teks.
- c) Data Tabel, meliputi data yang ditampilkan dalam bentuk tabel.
- d) Data Gambar, meliputi data berupa gambar.

Pada penelitian ini digunakan kombinasi keempat jenis data tersebut untuk mendapatkan data yang signifikan dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Data angka seperti jumlah timbulan sampah dan penduduk, data tertulis yaitu penjabaran terkait dengan pengelolaan sampah, penjabaran data berdasarkan undang-undang, peraturan daerah, jurnal, artikel, buku dan lain-lain. Data gambar seperti gambar peta wilayah, gambar pemberian bantuan prasarana pengelolaan sampah dari perusahaan, kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan lainnya. Data tabel seperti data kegiatan kolaborasi

pengelolaan sampah, jumlah timbulan sampah, jumlah sarana dan prasarana, serta target pengelolaan sampah.

1.9.6 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2014:193), terdapat dua sumber data yang diaplikasikan untuk pengumpulan data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada peneliti yang bersumber dari kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan observasi secara langsung di lapangan. Untuk memperoleh data primer, peneliti dapat menghimpun secara langsung. Metode yang dapat digunakan peneliti untuk menghimpun sumber data primer yaitu melalui observasi, dokumen pribadi, serta wawancara yang dilakukan dengan informan terkait, seperti Kabid PSLB3 DLH Kota Cirebon, Pelaksana Penanganan dan Pengurangan Sampah DLH Kota Cirebon, Sub Bag. TU UPT Pengelolaan Sampah, Pelaksana UPT TPA, Sekretaris Tim Fasilitasi TJSL, perwakilan perusahaan dan *stakeholders* lainnya yang berkolaborasi dengan DLH Kota Cirebon, ketua bank sampah, serta masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang didapat tidak secara langsung di lapangan, tetapi bersumber dari data yang sudah diolah oleh orang lain. Sumber data sekunder ini berperan sebagai sumber pendukung dan pelengkap atau menjadi data utama bila tidak tersedia narasumber. Data

sekunder dalam penelitian ini seperti salinan peraturan undang-undang terkait pengelolaan sampah di Kota Cirebon, dokumen resmi instansi seperti data kependudukan dari BPS, data capaian pengelolaan sampah dari website SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Databoks, berita online, buku, artikel dan penelitian terdahulu terkait kolaborasi dalam pengelolaan sampah.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang penting saat melakukan kegiatan penelitian. Dibutuhkan kecermatan dalam mengumpulkan data karena kegiatan pengumpulan data menentukan keberhasilan dalam penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi tanya jawab antara peneliti dan informan selaku pihak-pihak yang mengetahui banyak hal tentang permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilaksanakan secara mendalam dengan berdasarkan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat, yaitu Kabid PSLB3 DLH Kota Cirebon, Pelaksana Penanganan dan Pengurangan Sampah, Sub Bag. TU UPT Pengelolaan Sampah, Pelaksana UPT TPA, Sekretaris Tim Fasilitasi TJSL, *stakeholders* lainnya seperti Rumah Zakat Cirebon, PT. Pegadaian Cirebon, Dinas Sosial Kota Cirebon yang berkolaborasi dengan DLH Kota Cirebon, ketua bank sampah Edelweis dan Merbabu Asih, serta masyarakat.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di lokasi penelitian. Observasi mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data pengamatan secara komprehensif. Observasi dilakukan peneliti untuk melihat realita yang terjadi pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Pada penelitian ini, observasi dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Rumah Zakat Cirebon, PT. Pegadaian Cirebon, Dinas Sosial Kota Cirebon, bank sampah Edelweis dan Merbabu Asih, serta TPA Kopi Luhur.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014), dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu transkrip wawancara dengan informan, bukti foto dengan informan, keadaan fisik sarana dan prasarana pengangkutan sampah, kondisi terkini TPA Kopi Luhur, serta dokumen yang berkaitan dengan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon dan disertai dengan berita-berita dari media massa yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.8 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif milik Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:131) dan berlangsung secara

berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Interpretasi data sendiri masih menggunakan teori Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:132) yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada tahapan reduksi data terdiri dari klasifikasi, pengutamaan, mengabstraksikan serta proses penyederhanaan atau mentransformasikan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan ini terus dilakukan selama penelitian masih berlangsung, saat penelitian hingga laporan penelitian selesai.

2. Penyajian Data

Pada penyajian data dilakukan dengan penghimpunan data yang terstruktur sehingga data dapat disajikan dalam bentuk uraian narasi, tabel, atau gambar sehingga memberikan kemudahan dalam memahami penelitian yang dilakukan, kemudian data dapat dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan dengan melanjutkan ke tahapan analisis selanjutnya.

3. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan

Pada tahapan penarikan dan verifikasi kesimpulan, peneliti menguji keabsahan, kekuatan dari data yang telah di kumpul, direduksi dan disajikan agar dapat ditarik kesimpulan sehingga terciptanya keputusan. Peneliti menggunakan tahapan reduksi, dimana data dicatat yang didapat dari catatan lapangan, observasi, transkrip wawancara terkait dengan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon untuk ditelaah dan memisahkan mana data yang perlu

dimasukkan dan tidak dimasukkan. Selanjutnya, data tersebut dihimpun dan disajikan secara naratif dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dari data yang ada untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.

1.9.9 Kualitas Data

Sugiyono (2014:370) mengatakan bahwa triangulasi merupakan proses memeriksa data dari beragam sumber dengan metode yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, dilakukan dua cara untuk melakukan pemeriksaan ulang data yang meliputi:

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber (informan) yang berbeda.
2. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara memverifikasi data kepada sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Dalam menentukan kualitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik karena pada penelitian terkait kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon diperlukan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda agar mendapatkan data yang akurat dan kredibel sehingga dibutuhkan informan yang beragam agar hasil data yang didapatkan tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan dari berbagai macam sudut pandang serta peneliti perlu memadukan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang didapat terjamin kualitas dan kredibilitasnya.